

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2011-2014 TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA**

Makalah;

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia,

Dosen: M. Sobar, SE,I., M.Sc.



Disusun Oleh :

Nur Faizah

20110730035

**PROGRAM STUDI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2014**

Statement of Authorship

“Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan menggunakannya.

Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”

Nama : Nur Faizah
NPM : 20110730035
Tandatangan :

Mata Ajaran : Perekonomian Indonesia
Judul Makalah/Tugas : Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Indonesia
Tanggal : 25, Februari, 2014
Dosen : M. Sobar, SE,I., M.Sc.

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Tahun 2011- 2014 Terhadap Perekonomian Indonesia

Oleh : Nur Faizah

Absrtak

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak luput dari dua kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, dimana kebijakan fiskal membahas tentang pengurangan dan penambahan antara pengeluaran dan penerimaan. Sedangkan moneter membahas tentang kebijakan terhadap uang yang beredar. untuk menentukan kebijakan fiskal maka instrumennya adalah APBN. Dimana pemerintah dalam melakukan kebijakan dengan menurunkan dan menaikkan tarif pajak. Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah bisa menggunakan dua kebijakan fiskal yaitu, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang, oleh karena itu Indonesia selalu berusaha untuk membangun dan menstabilkan perekonomiannya. Dimana disampaikan dalam nota keuangan 2014 bahwa Indonesia sedang merancang pembangunan jangka panjang dari tahun 2005-2025. Dimana rancangan ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. dan saat ini Indonesia berada diakhir tahap menengah 2010-2014¹. Oleh karena itu perlu evaluasi dari tahun-tahun kemarin agar pembangunan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Untuk menjaga hal tersebut pemerintah perlu ikut campur untuk mengeluarkan kebijakan. Di ekonomi makro kita mengenal dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi yang menjaga stabilitas peredaran uang. Sedangkan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari, pengeluaran pemerintah, pajak untuk sisi penerimaan, dan transfer payment. Kebijakan fiskal membahas tentang defisit atau surplusnya suatu APBN. Defisit Fiskal terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada penerimaan, sedangkan surplus apabila penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran.

1 Nota Keuangan dan RAPBN 2014. pdf

TABEL 2
RINGKASAN APEN, 2008-2014
(miliar rupiah)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
A. Pendapatan Negara	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.502.005,0	1.662.508,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.497.521,4	1.661.148,4
1. Penerimaan Perpajakan	658.700,8	619.922,2	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.148.364,7	1.310.218,9
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	13,3	11,1	11,3	11,8	11,9	12,2	12,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.099.943,6	1.256.304,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	49.656,3	48.421,1	53.914,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320.604,6	227.174,4	268.941,9	331.471,8	351.804,7	349.156,7	350.929,5
II. Penerimaan Hibah	2.304,0	1.666,6	3.023,0	5.253,9	5.786,7	4.483,6	1.360,1
B. Belanja Negara	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.294.999,1	1.491.410,2	1.726.191,3	1.816.734,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	693.355,9	628.812,4	697.406,4	883.721,9	1.010.558,2	1.196.828,4	1.230.303,4
II. Transfer Ke Daerah	292.433,5	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	529.362,9	586.431,3
1. Dana Perimbangan	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.246,2	411.293,1	445.531,5	481.802,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.078,6	69.351,9	83.831,5	104.628,9
III. Suspen	(58,7)	(15,6)	(16,8)	(47,5)	206,9	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	84.308,5	5.163,2	41.537,5	8.862,5	(52.784,6)	(111.668,4)	(34.692,7)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(84.399,5)	(153.300,6)	(224.186,3)	(154.226,2)
<i>% terhadap PDB</i>	(0,08)	(1,58)	(0,73)	(1,14)	(1,86)	(2,38)	(1,49)
E. Pembiayaan	84.071,7	112.583,2	91.552,0	130.948,9	175.158,2	224.186,3	154.226,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102.477,6	128.133,0	96.118,5	148.748,0	198.622,5	241.056,1	173.224,2
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(17.799,2)	(23.464,4)	(16.869,8)	(18.998,0)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	79.950,4	23.964,4	44.706,3	46.549,4	21.857,6	0,0	0,0

Nota Kaki

Dilihat dari data diatas bahwa anggaran pemerintah selalu deficit, apakah memang selalu defisit atau sebuah kebijakan? untuk itu penulis perlu membahas dan memperdalam tentang anggaran Negara. Dan kebijakan fiskal juga bisa mencegah pengangguran dan mencegah inflasi tetapi kebijakan fiskal juga bisa menyebabkan inflasi. Untuk itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling berhubungan. kebijakan fiskal juga sangat berhubungan dengan pertumbuhan suatu Negara. Untuk itu penulis akan sedikit membahas tentang “ Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Tahun 2011-2014 terhadap Perekonomian Indonesia “

B. Kebijakan fiskal di Indonesia

- Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*) merupakan suatu kebijaksanaan yang dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan kebijaksanaan ini dilakukan dengan jalan menambah atau mengurangi jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah pajak pemerintah, jumlah transfer pemerintah atau melaksanakan kombinasi dari ketiga-tiganya.²

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Seperti ekonomi dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor riil dan sektor moneter. Dimana sektor riil menghasilkan produksi barang dan jasa, sedangkan sektor moneter hasil dari sektor riil dalam bentuk uang. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil di pengaruhi oleh

2 Drs. Sudarso, pengantar ekonomi makro,1991. 63

pemerintah lewat kebijakan fiskal di Indonesia kebijakan ini adalah tanggung jawab Menteri Keuangan (MK). Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter di pengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya tanggung jawab Bank Indonesia.³

Kebijakan fiskal di Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Instrument kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah (*Government expenditure*) G , pajak (tx), *transfer payment* (subsidi) Tr . *Transfer payment* biasanya digunakan untuk pengeluaran yang tidak menghasilkan pendapatan hanya untuk mensejahterakan rakyat, misalnya beasiswa, subsidi, dan bencana alam.

Apabila Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) mengalami defisit dan surplus dimana terjadinya defisit jika pengeluaran (G) lebih besar dari pada penerimaan (T), $G > T$, dan apabila penerimaan lebih besar (T) dari pada pengeluaran pemerintah (G) maka APBN mengalami surplus, $G < T$. Jika APBN defisit pemerintah dalam kebijakannya mempunyai dua opsi untuk membiayai atau menutupi kekurangan APBN, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat *printing money* (cetak uang) yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat dan bisa berdampak pada peningkatan laju inflasi yang beresiko terhadap perekonomian Indonesia.⁴

Opsi kedua yaitu melakukan pinjaman baik pinjaman dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan surat obligasi atau pinjaman luar negeri. Biasanya pemerintah lebih memilih opsi yang kedua karena tidak terlalu beresiko.⁵

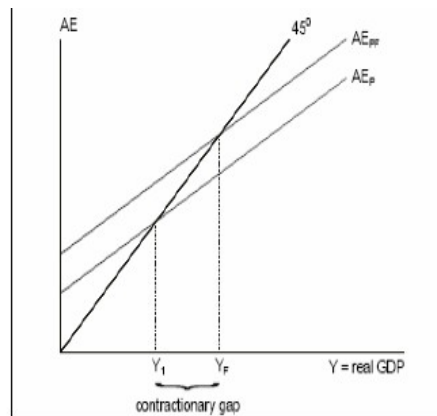
Apabila perekonomian sedang menurun atau *negative* yang bisa dilihat dari pertumbuhan PDB (*produk domestik bruto*), yakni jika PDB menurun maka ekonomi negara menurun dan jika PDB meningkat maka ekonomi negara meningkat. Jika ekonomi menurun maka pemerintah berkewajiban sesuai fungsinya memberi insentif atau dorongan agar pertumbuhan kembali meningkat. Untuk tujuan tersebut pemerintah melalui Kebijakan Fiskal mempunyai dua opsi yaitu. Pertama, menaikkan pengeluaran ($G_0 - G_1 > 0$) atau/ dan mengurangi tarif pajak pendapatan ($t_0 - t_1 < 0$) jika kebijakan memakai system pajak pendapatan yang berlaku maka hal tersebut memakai kebijakan fiskal ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, dan mencegah pengangguran.

3 Dr.Tulus T.H.Tambunan,Perekonomian Indonesia. 162

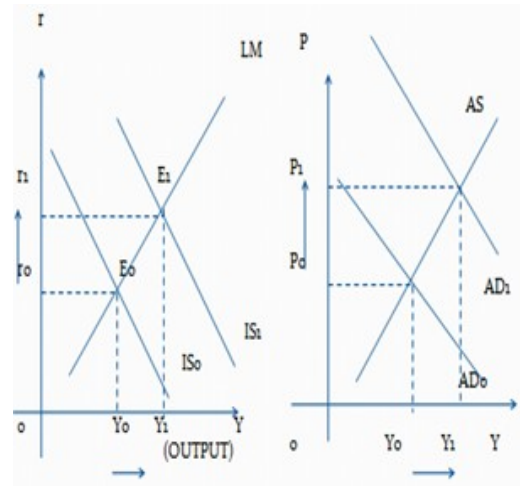
4 Dr.Tulus T.H.Tambunan,Perekonomian Indonesia

5 Dr.Tulus T.H.Tambunan,Perekonomian Indonesia.164

Kurva Kebijakan Fiskal Ekspansif



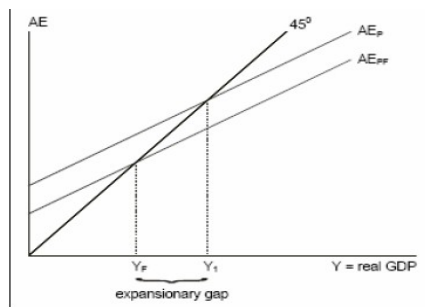
Gambar 2.1. Kurva kebijakan fiskal ekspansif



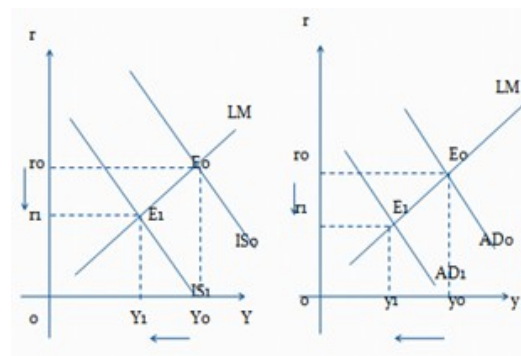
Kebijakan fiskal yang dilakukan adalah untuk meningkat pendapat dan menstimulus pertumbuhan ekonomi, dimana kita lihat kurva AD dan IS diatas jika pengeluaran pemerintah meningkat maka pendapatan juga akan meningkat, tetapi pada kurva IS jika pendapatan meningkat maka tingkat bunga akan meningkat, dan ini mengakibatkan suku bunga naik dan terjadi inflasi. Untuk itu perlu ada kebijakan fiskal yang bisa mengendalikan masalah ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kontraktif.

Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif adalah mengurangi pengeluaran $\Delta G < 0$ atau meningkatkan pendapatan pajak lewat menaikkan tariff pajak ($\Delta t > 0$) bertujuan untuk mencegah inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.⁶

Kurva Kebijakan fiskal kontraktif



Gambar 2.2. Kurva kebijakan fiskal kontraktif



Dimana jika pajak dinaikan maka daya beli dan konsumsi masyarakat menurun, karena uang mereka di pakai untuk membayar pajak yang tinggi, dan secara otomatis pendapatan mereka menurun (berkurang).

- b. Pajak di defenisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan sektor perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa secara langsung. Pajak bersifat wajib, memaksa, dan legal dan besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah di pengaruhi dengan besar kecilnya pendapatan dan pajak mempengaruhi produksi dan konsumsi. ⁷
- c. Utang Pemerintah, utang yang dimiliki pemerintah baik dalam negeri maupun utang luar negeri. yang digunakan untuk membantu APBN.

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2008-2014

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	6,0	4,6	6,2	6,5	6,3	6,3	6,4
Inflasi (% yoy)	11,1	2,8	6,96	3,79	4,3	7,2	4,5
Nilai tukar rupiah (Rp/USD)	9.691	10.408	9.087	8.779	9.384	9.600	9.750
Suku bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) *)	9,3	7,6	6,6	4,8	3,2	5,0	5,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	97,0	61,6	79,4	111,5	112,7	108,0	106,0
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	931	944	954	900	861	840	870
Lifting Gas (ribu barel per hari)	-	-	-	-	-	1.240	1.240

*) Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

Kebijakan fiskal tahun 2014 masih bersifat ekspansif. Dalam menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam titik aman melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk membiayai defisit RAPBN tahun 2014 pemerintah akan tetap memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang .⁸

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2008–2014
(miliar rupiah)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
A. Pendapatan Negara	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.502.005,0	1.662.508,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.497.521,4	1.661.148,4
1. Penerimaan Perpajakan	658.700,8	619.922,2	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.148.364,7	1.310.218,9
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	13,3	11,1	11,3	11,8	11,9	12,2	12,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.099.943,6	1.256.304,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	49.656,3	48.421,1	53.914,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320.604,6	227.174,4	268.941,9	331.471,8	351.804,7	349.156,7	350.929,5
II. Penerimaan Hibah	2.304,0	1.666,6	3.023,0	5.253,9	5.786,7	4.483,6	1.360,1
B. Belanja Negara	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.294.999,1	1.491.410,2	1.726.191,3	1.816.734,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	693.355,9	628.812,4	697.406,4	883.721,9	1.010.558,2	1.196.828,4	1.230.303,4
II. Transfer Ke Daerah	292.433,5	308.585,2	344.727,6	411.324,8	480.645,1	529.362,9	586.431,3
1. Dana Perimbangan	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.246,2	411.293,1	445.531,5	481.802,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.078,6	69.351,9	83.831,5	104.628,9
III. Suspen	(58,7)	(15,6)	(16,8)	(47,5)	206,9	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	84.308,5	5.163,2	41.537,5	8.862,5	(52.784,6)	(111.668,4)	(34.692,7)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(84.399,5)	(153.300,6)	(224.186,3)	(154.226,2)
<i>% terhadap PDB</i>	(0,08)	(1,58)	(0,73)	(1,14)	(1,86)	(2,38)	(1,49)
E. Pembiayaan	84.071,7	112.583,2	91.552,0	130.948,9	175.158,2	224.186,3	154.226,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102.477,6	128.133,0	96.118,5	148.748,0	198.622,5	241.056,1	173.224,2
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(17.799,2)	(23.464,4)	(16.869,8)	(18.998,0)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	79.950,4	23.964,4	44.706,3	46.549,4	21.857,6	0,0	0,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2014

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian:

1. Apabila ekonomi sedang memanas yang mengakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal kontraktif, dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, jadi dapat mencegah inflasi. Yaitu jika pajak naik, uang yang beredar turun, penerimaan pemerintah naik, investasi naik, pembangunan naik.
2. Menurunkan tingkat pengangguran.
3. Apabila APBN meningkat maka belanja pemerintah meningkat sehingga pendapatan PNS meningkat, karena belanja pemerintah meningkat.

C. Kebijakan fiskal dan Utang Negara

Berikut gambaran perkembangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN APBN, 2008–2014
(Triliun Rupiah)

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (APBNP)	2014 (RAPBN)
A. PENDAPATAN NEGARA	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.338,1	1.502,0	1.662,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5	1.661,1
1. Penerimaan perpajakan	668,7	609,9	723,3	873,9	980,5	1.128,4	1.310,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2	350,9
II. Penerimaan Hibah	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5	1,4
B. BELANJA NEGARA	985,7	937,4	1.042,1	1.295,0	1.491,4	1.726,2	1.816,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8	1.230,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	259,7	307,0	332,9	417,6	489,4	622,0	612,7
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	433,7	321,8	364,5	466,1	521,1	574,8	617,7
II. Transfer ke Daerah	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	529,4	586,4
1. Dana Perimbangan	278,7	287,3	316,7	347,2	411,3	445,5	481,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13,7	21,3	28,0	64,1	69,4	83,8	104,6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	84,3	5,2	41,5	8,9	(52,8)	(111,7)	(34,7)
D. SURPLUS(DEFISIT) ANGGARAN	(4,1)	(88,6)	(46,8)	(84,4)	(153,3)	(224,2)	(154,2)
% defisit terhadap PDB	(0,08)	(1,58)	(0,73)	(1,14)	(1,86)	(2,38)	(1,40)
E. PEMBIAYAAN	84,1	112,6	91,6	130,9	175,2	224,2	154,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102,5	128,1	96,1	148,7	198,6	241,1	173,2
1. Perbankan dalam negeri	16,2	41,1	22,2	48,9	62,7	34,6	4,3
2. Non perbankan dalam negeri	86,3	87,1	73,9	99,8	135,9	206,5	168,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(18,4)	(15,5)	(4,6)	(17,8)	(23,5)	(16,9)	(19,0)
1. Penarikan pinjaman LN (bruto)	50,2	58,7	54,8	33,7	31,4	49,0	43,2
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(5,2)	(6,2)	(8,7)	(4,2)	(5,8)	(6,7)	(5,3)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(65,4)	(68,0)	(50,6)	(47,3)	(51,1)	(59,2)	(56,9)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	80,0	24,0	44,7	46,5	21,9	0,0	0,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan table perkembangan APBN diatas, anggaran selalu berada pada kondisi yang defisit dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya. Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan pada sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Menurut artikel anggaran Depkue, dari sisi pengeluaran pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan jalan melakukan penghematan di luar belanja rutin. Sementara dari sisi penerimaan ada dua opsi yang bisa diambil, yaitu apakah menggenjot penerimaan dari pajak ataukah menambah utang. Dari sisi penghematan pengeluaran bisa dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif. Dimana dana yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan manfaat atau hasilnya tepat sasaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. dan untuk sisi penerimaan pemerintah berharap dari tambahan penerimaan dari ekspor pertambangan atau sector komoditas serta penerimaan deviden dari BUMN. tetapi hal itu belum maksimal. Alternatif lainnya yaitu dengan menggenjot penerimaan pajak dan menambah utang baru.⁹ Yang pertama dengan menggenjot pajak atau menaikkan tariff pajak (kebijakan fiskal kontraktif). Misalnya dengan menaikkan pajak maka akan membebankan rakyat, banyak perusahaan bangkrut karena tarif pajak tinggi, banyak tenaga kerja di PHK, dan harga barang baku maupun jadi naik dan bisa mengakibatkan inflasi. Opsi pertama cukup berisiko, maka pemerintah mengarah pada opsi yang kedua yaitu dengan menambah utang baru. Dalam artikel yang membahas tentang fiskal mengatakan masalah ketergantungan pada utang luar negeri tidak terlalu bermasalah karena pemerintah menganggap utang yang didapat

⁹ www.anggaran. Departemen keuangan.

merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan Negara. Walaupun sebenarnya utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun

Tabel. 1

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Defisit APBN	-23.810	-14.408	-29.141	-49.844	-4.121	-88.619	-46.846	-84.339
Pembayaran Utang	-71.948	-61.569	-77.741	-100.705	-108.958	-123.279	-135.893	-138.818
Pembiayaan Non Utang	22.713	-7.745	16.913	6.420	-2.500	-12.395	-20.799	-22.262
Kebutuhan Pembiayaan	-73.045	-83.722	-89.970	-144.129	-115.579	-224.292	-203.538	-245.419
Sumber Pembiayaan	70.031	80.435	90.244	136.742	195.529	248.257	248.243	292.029
Utang	50.761	73.871	87.160	134.025	176.468	207.200	222.822	241.503
Non Utang	19.270	6.564	3.084	2.717	19.061	41.057	25.421	50.526
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan	-3.014	-3.287	274	-7.387	79.950	23.965	44.705	46.610

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan 2013.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai dua sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Pertama sumber pembiayaan non utang , yang terdiri dari penjualan asset Negara seperti privatisasi BUMN, penjualan asset kelolaan BPPN, dan rekening dana investasi. Yang kedua adalah utang yang diperoleh dari pinjaman luar negeri atau dalam negeri. Bila dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan, maka proporsi pembiayaan melalui utang mencapai rata-rata 100,1 % pertahun. Jadi apabila APBN defisit maka yang di pakai kebijakan ekspensif, dengan alternative utang, dan apabila perekonomian dalam keadaan negative maka yang dipakai adalah kebijakan fiskal kontraktif.¹⁰

Oleh karena itu kebijakan fiskal perlu untuk diperketat agar efesien dan efektif, terutama menyangkut APBN. Dalam hal penerimaan dan belanja negara. Agar tidak terjadi penculikan dan pemalingan uang di sejumlah oknum-oknum pemerintah. dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar pajak. Tidak ada yang dikecilkan dengan menerima sogokkan dari individu maupun perusahaan yang berkepentingan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, jangan korupsi bila ingin sejahtera.

¹⁰ Utang pemerintah_peran dan ancaman terhadap APBN. pdf

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, Tulus. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan indonesia)*. Jakarta: Erlangga.

Karim, Adiwarman.2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

www.bps.go.id

www.slideshare.com

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%202014.pdf>

